



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ambo Assa bin Panongi, tempat dan tanggal lahir Wajo, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun To Pao, Desa Tolada, Malangke, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Sameria binti H. Terang, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 11 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di Dusun To Pao, Desa Tolada, Malangke, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Basnar, S.H.** adalah Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada Kantor BASNAR ,SH & Rekan, yang berkantor di Jalan Datuk Pattimang No. 7, Desa Laba Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu utara, Sulawesi Selatan, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2020, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 110/SK/2020/PA.Msb, tanggal 16 Desember 2020, sebagai **Kuasa Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2020 yang didaftarkan secara elektronik (**E-Court**) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 306/Pdt.P/2020/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

- **Jumarni binti Ambo Assa**, tempat dan tanggal lahir Tolada, 1 Oktober 2004, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun To Pao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

dengan seorang laki - laki bernama :

- **Muhammad Aswin bin Dg. Patappa**, tempat dan tanggal lahir Tocule, 10 Maret 1995, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dorie, Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

yang akan dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan calon suaminya karena saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil usia 21 minggu;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan selama kurang lebih 8 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut serta keluarga kedua belah pihak telah bertemu dan membicarakan tentang maksud dan tujuan untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan tidak ada yang keberatan;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk menjadi ibu rumah tangga dan begitupun juga dengan calon suaminya telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masambac.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (**Jumarni binti Ambo Assa**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Muhammad Aswin bin Dg. Patappa**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa para Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan melalui domisili Elektronik atas panggilan tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon yang diwakili Kuasa para Pemohon hadir di persidangan, kemudian persidangan diawali dengan penasehatan oleh Hakim terkait keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa penasehatan tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama **Jumarni binti Ambo Assa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari para Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah mengenal seorang laki-laki yang bernama Muhammad Aswin bin Dg. Patappa;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Aswin bin Dg. Patappa telah lama mengenal dan telah pacaran;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Aswin bin Dg. Patappa serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah dalam waktu dekat;
- o Bahwa keluarga Jumarni binti Ambo Assa dan keluarga Muhammad Aswin bin Dg. Patappa telah membicarakan rencana pernikahan kami;
- o Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena saya belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Muhammad Aswin bin Dg. Patappa berstatus bujang;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Muhammad Aswin bin Dg. Patappa tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda atau sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun 2 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah;
- o Bahwa anak para Pemohon belum bekerja, sedangkan calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan usaha sarang walet dan berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang apalagi calon istri telah hamil usia 21 minggu;

Bahwa Hakim telah mendengar pula keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Aswin bin Dg. Patappa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Jumarni binti Ambo Assa;
- o Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa telah lama mengenal Jumarni binti Ambo Assa dan sudah lama pacaran;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa dan anak para Pemohon sudah serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah dalam waktu yang dekat;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan rencana pernikahan tersebut;
- o Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa mengaku berstatus bujang, sedangkan anak para Pemohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- o Bahwa dia dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
- o Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa bekerja sebagai karyawan usaha sarang walet dan berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan;
- o Bahwa pernikahan ini hendak segera dilaksanakan karena keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan anak para Pemohon dan dirinya terjerumus dalam perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil usia 21 minggu ;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama:

1. Dg. Patappa bin Dg. Pagella, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Dori'e/Pude'e, Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai ayah kandung Muhammad Aswin bin Dg. Patappa;

2. Rahmawati binti Dg. Masua, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Dori'e/Pude'e, Desa Benteng, Kecamatan Penrang, Kabupaten Luwu Utara, sebagai ibu kandung Muhammad Aswin bin Dg. Patappa;

yang atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami berdua adalah orang tua dari Muhammad Aswin bin Dg. Patappa;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak perempuan para Pemohon bernama Jumarni binti Ambo Assa;
- Bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon telah membicarakan rencana pernikahan anak kami tersebut;
- Bahwa maksud pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, namun ditolak karena anak para Pemohon sebagai calon istri belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak khawatir jika dibiarkan anak para Pemohon dan anaknya terjerumus pada perbuatan terlarang karena keduanya sudah sering pergi berdua-an apalagi calon istri telah hamil usia 21 minggu ;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah menasehatkan kepada anak kami, akan tetapi keduanya tetap berkeinginan untuk segera menikah, dan kami selaku orang tua juga telah mempersiapkan segala sesuatunya;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap membimbing dan membantu kedua calon mempelai apabila ada masalah dalam rumah tangganya baik masalah ekonomi, sosial, maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon adalah karyawan usaha sarang walet dan berpenghasilan sekitar Rp.3.000.000,00 per bulan;
- Bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa dan Jumarni binti Ambo Assa telah siap lahir batin untuk menikah dan berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo Assa (Pemohon I), NIK.7322013112800058 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sameria (Pemohon II), NIK.7322015102830002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga, Ambo Assa (Pemohon I), Nomor 7322011908090005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1176/IST/A/BK-KB/LU/2005 atas nama Jumarni (anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 12 April 2005, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 731312-LT-22022011-0001 atas nama Muhammad Aswin (calon suami anak para Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara pada tanggal 22 Februari 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Jumarni binti Ambo Assa tertanggal 25 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 139 Tolada, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor B.760/Kua.21.11.04/PW.00/12/2020, tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 435.9/RM.1574/XII/2020 atas nama Jumarni binti Ambo Assa (Anak para Pemohon) dikeluarkan

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rumah Sakit Andi Djemma, Masamba, tanggal 15 Desember 2020 bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Nomor 480/495/DP2PA atas nama Jumarni (Anak para Pemohon) dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA), Kabupaten Luwu Utara, tanggal 15 Desember 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Ambo Tuo bin Baso Panaungi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Possila, Desa Polewali, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwu Utara.. Saksi mengaku sebagai adik Pemohon I, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Jumarni binti Ambo Assa;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Dg. Patappa
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keluarga Muhammad ASwin bin Dg. Patappa telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 21 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 16 tahun 2 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan usaha sarang walet dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: Hj. Rosnaeni binti H. Lauseng, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun To'pao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara.. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Jumarni binti Ambo Assa;
- Bahwa benar, para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Aswin bin Dg. Patappa
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa baik anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa setahu saksi keluarga Muhammad ASwin bin Dg. Patappa telah datang melamar anak Pemohon, dan lamaran tersebut telah diterima serta disetujui untuk segera dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa pada dasarnya seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa karena hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang apalagi calon istri telah hamil 21 minggu;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 16 tahun 2 bulan;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga demikian pula calon suaminya telah 16 tahun 2 bulan serta mampu untuk membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai karyawan usaha sarang walet dan berpenghasilan Rp.3.000.000,00 perbulan
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, tentang resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, akan tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian semula untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga Hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama **Jumarni binti Ambo Assa** dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Aswin bin Dg. Patappa**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, karena usia anak para Pemohon masih kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon tersebut;

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi apalagi calon istri (anak para Pemohon) telah hamil, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang oleh agama serta anak para Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ambo Tuo bin Baso Panaungi dan Hj. Rosnaeni binti H. Lauseng yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 merupakan alat bukti berupa fotocopy-an namun oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti tertulis P.8, dan P.9 merupakan alat bukti tertulis berupa asli dan telah diperiksa oleh Hakim, yang mana semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Masamba berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3 dan P.4 juga terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Jumarni binti Ambo Assa lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 pula diketahui para Pemohon adalah orang tua kandung dari Jumarni binti Ambo Assa, sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka para Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Muhammad Aswin bin Dg. Patappa (calon suami anak para Pemohon) lahir pada tanggal 10 Maret 1995, sehingga umurnya sekarang telah mencapai 25 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon yang bernama Nur Alia membuktikan bahwa anak para Pemohon telah lulus pendidikan setingkat SD;

Menimbang, bahwa Bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, berupa asli Surat Keterangan Dokter atas nama Jumarni binti Ambo Assa, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan dalam keadaan

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil dengan usia kehamilan 21 minggu sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani dan telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuktikan bahwa para Pemohon telah menghadap dan melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 (sembilan belas) tahun sedangkan calon suami anak para Pemohon telah cukup umur;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, keduanya sudah saling mengunjungi dan telah berpacaran selama enam bulan bahkan anak para Pemohon telah hamil usia 21 minggu ;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah sepakat akan meresmikan hubungan asmaranya tersebut dengan melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa kehendak perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan pada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan karena belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon telah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Demikian pula calon suami anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga, ia juga telah bekerja sebagai karyawan usaha sarang walet dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.3.000.000,00 per bulan;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon telah mengizinkan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon kelak baik masalah ekonomi, sosial, maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;
8. Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Menimbang, bahwa fakta hukum *pertama* dan *kedua*, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan calon suaminya, dimana hubungan keduanya sudah sangat dekat dan akrab, keduanya telah bergaul sedemikian eratnya bahkan anak para Pemohon telah hamil usia 21 minggu, sehingga dikhawatirkan keduanya akan terjerumus kedalam situasi yang lebih buruk dan dilarang oleh agama, dan demi kemashlahatan bagi anak yang dikandungnya tersebut, oleh karenanya pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketiga* dan *keempat*, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk meresmikan hubungan asmaranya dengan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, hal ini merupakan kesadaran yang baik bagi anak para Pemohon akan hal-hal yang mengakibatkan dampak hukum yang lebih luas di kemudian hari;

Menimbang, bahwa fakta hukum *kelima* dan *keenam*, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah serta menyatakan kesiapan dan kesanggupannya untuk melangkah membangun rumah tangga bersama dengan seluruh konsekuensi yang diembannya, baik materi maupun psikologi, hal ini menandakan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sebagai pemuda dan pemudi telah melakukan persiapan-persiapan hendak menikah yaitu persiapan fisik, penyediaan biaya yang cukup, persiapan mental, siap menghadapi apapun, persiapan spiritual, kerja keras dan bertawakkal kepada Allah;

Menimbang, bahwa fakta hukum *ketujuh*, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah mendapat restu dan persetujuan dari para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta mereka bersedia membimbing dan mau membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suami para Pemohon nantinya, hal ini merupakan bekal berharga bagi anak para Pemohon dan calon suaminya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang bahwa fakta hukum *kedelapan*, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon terkait dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan apakah ada hajat dan alasan permohonan yang diajukan benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah;

Menimbang bahwa dispensasi kawin merupakan salah satu item perkara dalam bidang perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri secara *yuridis-normatif* sangat terkait dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu yang bersifat *privat* maupun yang bersifat *publik*, karenanya Hakim mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan batas usia kawin dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka, sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan pemberian dispensasi kawin tersebut tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif* dalam peraturan

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, maka Hakim membuat rumusan unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam perkara ini sebagai berikut :

- Tidak adanya halangan untuk menikah;
- Dewasa dalam melakukan perbuatan hukum;
- Adanya peran orangtua untuk membimbing dan membina;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur diberikannya dispensasi kawin;

1. Tidak ada halangan untuk menikah

Menimbang bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam diri anak para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur pertama telah terpenuhi** dalam perkara ini;

2. Dewasa untuk melakukan perbuatan hukum

Menimbang bahwa usia minimal dalam hukum Islam tidak difahami dalam terminologi kuantitatif, tapi kualitatif. Jadi patokannya bukan berapa usia paling rendah seseorang bisa menikah, tetapi sejauh mana kualitas kesiapan calon mempelai;

Menimbang bahwa syarat batas minimal bagi laki-laki maupun perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki-laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan mereka;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur calon mempelai bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan), adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “*baligh*” tidak dengan perhitungan usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*”, maka undang-undang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki-laki maupun perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*baligh*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya sedemikian eratnya apalagi saat ini anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 21 minggu, adalah merupakan perwujudan kematangan jasmani, dan rencana untuk melangsungkan pernikahan dengan berbagai persiapannya merupakan bentuk tanggungjawab dan kematangan berpikir anak para Pemohon, karenanya anak para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh*, sehingga Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur kedua telah terpenuhi** dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



3. Adanya peran orangtua untuk membina dan membimbing

Menimbang, bahwa fakta hukum yang menyatakan para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon yang sanggup membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon isterinya, menunjukkan perhatian besar dari orangtua terhadap masa depan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon yang pada dasarnya masih dalam penguasaan dan tanggung jawab orang tuanya masing-masing, maka peran orang tua sangat diperlukan demi keberlangsungan hidup di masa yang akan datang, hal demikian senada dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka peran orang tua harus mengarahkan dan mencegah perkawinan anak di usia dini;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta hukum di persidangan, ternyata para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah berupaya untuk mengarahkan dan mendidik anak sebaik-baiknya dan tidak ada indikasi untuk mengeksploitasi anak secara biologis maupun seksual dengan menikahkan anak di usia dini kan tetapi anak para Pemohon dan calon suaminya tetap ingin melanjutkan rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa senyatanya dalam persidangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah berkomitmen untuk tetap membimbing, membina dan membantu anak-anak mereka meskipun telah menikah apabila ada masalah dalam rumah tangganya seperti masalah ekonomi, sosial, kesehatan maupun masalah lain yang mungkin timbul dalam rumah tangga mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat **unsur ketiga telah terpenuhi** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dan untuk menjawab petitum para Pemohon, maka Hakim mempertegas pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini atas kehendak sendiri dan kesadaran sendiri, maka Hakim berpendapat para Pemohon selaku orang tua berperan secara langsung menjadi pembimbing dan

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut membina kedua mempelai agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, dikhawatirkan timbul mafsadat yang lebih besar pada keduanya;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya **patut untuk dikabulkan**, dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Jumarni binti Ambo Assa**) untuk menikah dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama (**Muhammad Aswin bin Dg. Patappa**);
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Hakim Tunggal **Fariq Al Faruqie, S.H.** penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Rusman S, S.EI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon yang diwakili Kuasa para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Rusman S, S.EI

Fariq Al Faruqie, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0,00
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Masamba

Drs. H. Tawakkal, M.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2020/PA.Msb